



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

Jalan RTA Milono Nomor 9, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
Telp. (0536) 3221853 – 3221854 Fax 3221854, pt-palangkaraya.go.id, ptpalangka@gmail.com

Nomor : 1223/KPT.W16/RA.1/VII/2024

Palangka Raya, 19 Juli 2024

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

di

Pangkalan Bun

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan disampaikan hal-hal :

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimaksudkan untuk:
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh nilai sebesar **77,25 (BB)** atau **Sangat Baik**.
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20	23,10
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,20	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	12,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,50	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,40	77,25
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Matriks Tujuan pada Bab II Reviu Ke-4 Rencana Strategis (Renstra) PN Pangkalan Bun belum sesuai Renstra Mahkamah Agung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PN Pangkalan Bun.
2.	Pohon Kinerja belum selaras dengan Reviu Ke-4 Renstra PN Pangkalan Bun.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Surat undangan dan notulensi monitoring dan evaluasi (monev) Rapat Anggaran Triwulan I-IV belum ditandatangani pejabat terkait.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang diatur dalam Permenpan No 53 Tahun 2014 dan SK Sekretaris MA Nomor 2049 Tahun 2022, yaitu belum dijelaskan mengenai anggaran dalam analisa efisiensi sumber daya pada masing-masing indikator.
2.	Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja (rekomendasi) belum ada pada LKjIP tahun 2023.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi (TLHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 belum dilampirkan data dukung rapat tindaklanjut LHE AKIP yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.
2.	Matriks TLHE belum sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam surat Sekretaris MA Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023.
3.	Pelaksanaan Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja belum didukung dengan adanya SK Tim Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.



4.	Rekomendasi dalam LHE AKIP Tahun 2022 belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan pendalaman yang memadai.
----	--

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar Matriks Tujuan pada Bab II Reviu Ke-4 Renstra PN Pangkalan Bun diselaraskan dengan Renstra MA dan IKU PN Pangkalan Bun.
2.	Agar indikator pada Pohon Kinerja diselaraskan dengan Reviu Ke-4 Renstra.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Agar dokumen monev Rapat Anggaran Triwulan I-IV ditandatangani oleh pejabat terkait.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar LKjIP disusun sesuai dengan standar yang diatur dalam Permenpan No 53 Tahun 2014 dan SK Sekretaris MA Nomor 2049 Tahun 2022 dengan memberi penjelasan tambahan mengenai anggaran dalam analisa efisiensi sumber daya pada masing-masing indikator.
2.	Agar Bab III LKjIP memuat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja (rekomendasi) pada setiap indikator kinerja.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Agar TLHE AKIP Tahun 2022 dilaksanakan melalui rapat TLHE AKIP yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.
2.	Matriks dokumen TLHE belum sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam surat Sekretaris MA Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023 Tanggal 17 Juli 2023.
3.	Agar ditetapkan SK Tim Monev atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
4.	Agar TLHE AKIP dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai.



Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian laporan kinerja tahun berikutnya melalui aplikasi seMAR ([bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAR](http://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAR)). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

